

KRITIK KWEK KEK BENG TERHADAP PENDIDIKAN ANAK-ANAK TIONGHOA DI HINDIA BELANDA

Fauziyatur Rohmah

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail: zheeya.november@gmail.com

Sri Mastuti P.

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kek Beng merupakan seorang tokoh peranakan Tionghoa yang pernah menjabat sebagai *hoofdredactur* dari koran *Sin Po* dan merupakan penerus dari paham nasionalisme Tionghoa. Dalam mencari kedudukan etnis Tionghoa di Hindia Belanda dalam masa Penjajahan Belanda, Kwee Kek Beng tampil sebagai tokoh kontroversial yang membela orang-orang Tionghoa peranakan. Kritiknya terhadap pendidikan anak-anak Tionghoa banyak mendapat tantangan dan cemoohan dari berbagai pihak diantara orang-orang Tionghoa yang lain.

kritik yang dilakukan oleh Kwee Kek Beng terhadap pendidikan untuk anak-anak Tionghoa di Hindia Belanda dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya: segregasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial terhadap pendidikan orang-orang Tionghoa, nasionalisme Tionghoa yang kemudian menyebar ke Asia Tenggara, termasuk ke Hindia Belanda. Selanjutnya, setelah Kwee Kek Beng masuk ke dalam harian *Sin Po* Kwee Kek Beng banyak belajar dari Tjoe Bou San. Permasalahan identitas orang-orang Tionghoa dan perdebatan mengenai sekolah-sekolah untuk anak Tionghoa juga menjadi pemicu Kwee Kek Beng untuk melakukan kritik. Kwee Kek Beng tidak menyetujui adanya sistem sekolah yang diterapkan pada sekolah THHK dan HCS, oleh sebab itu perlu dilakukan *reorganisasi* terhadap keduanya dan membagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas yang dikhususkan untuk anak-anak Tionghoa yang ingin kembali ke Tiongkok dan yang tetap tinggal di Hindia Belanda, namun tetap memperhatikan kepentingan anak-anak Tionghoa. hal ini dilakukan agar pendidikan anak-anak Tionghoa tidak tertinggal dengan etnis yang lain.

Kata Kunci: Kritik, Kwee Kek Beng, Pendidikan, Tionghoa

Abstract

Kwee Kek Beng criticism against the education of Chinese children in the Netherlands Indies. Kwee Kek Beng was a prominent Peranakan Chinese who had served as hoofdredactur of Sin Po newspaper and is the successor of Chinese nationalism. In the search for the position of ethnic Chinese in the Netherlands Indies during Dutch colonialism, Kwee Kek Beng appeared as a controversial figure who defended the Peranakan people. His criticism of the education of Chinese children got a lot of challenges and ridicule from various parties among the other Chinese people.

The criticisms made by Kwee Kek Beng to education for children of Chinese in the Netherlands Indies influenced by several things including: segregation and discrimination by the government against the colonial education of the Chinese people, Chinese nationalism which then spread to Southeast Asia, including to the Dutch East Indies. Furthermore, after Kwee Kek Beng into the daily Sin Po, Kwee Kek Beng much to learn from the Tjoe Bou San. Problems identity of the Chinese people and the debate about schools for Chinese children is also a trigger Kwee Kek Beng to criticism. Kwee Kek Beng do not agree that the school system be applicable to the school THHK and HCS, therefore it needs to be done on both reorganization and split into two classes, which is devoted to Chinese kids who want to go back to China and who remained in the Dutch East Indies, but considering the interest of Chinese children. this is done so that the education of Chinese children are not left behind with the other ethnic.

Keywords: Criticism, Kwee Kek Beng, Education, Tionghoa.

A. Pendahuluan

Pada pertengahan abad ke-19 merupakan periode yang penting bagi orang-orang Tionghoa yang ada di Hindia Belanda, karena pada periode tersebut orang-orang Tionghoa yang ada di Hindia Belanda secara serempak mulai mengidentifikasi kembali identitas

ke-Tionghoa-an dan kebudayaan Tionghoa. Munculnya gerakan nasioanalisme di daratan Tiongkok membantu perkembangan kesatuan secara hukum diantara orang Tionghoa yang ada di Hindia Belanda, terutama Tionghoa peranakan dan menggugah kebanggaan akan Tiongkok, kebudayaan orang-orang Tionghoa, dan

perasaan malu diantara orang-orang Tionghoa Totok atas kurang mampunya mereka dalam berbahasa Tionghoa.¹

Gerakan pembaharuan Tiongkok memberikan dorongan dan kesadaran dikalangan masyarakat Tionghoa akan perlunya pendidikan, persatuan, dan adanya organisasi yang dapat mengangkat kehidupan mereka. Disisi lain, situasi di dalam maupun di luar Indonesia yang berstatus sebagai negara jajahan menjadikan orang-orang Tionghoa peranakan semakin mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Tiongkok. Manifestasi ini diwujudkan dalam membentuk perhimpunan-perhimpunan Cina Raya seperti : THHK, surat kabar Melayu Tionghoa yaitu Li Po dan lain-lain.

Berdirinya sekolah-sekolah THHK dan tumbuhnya nasionalisme Tiongkok di kalangan masyarakat tionghoa ini menimbulkan sentimen bagi pemerintah kolonial Belanda, sehingga pada tahun 1907 pemerintah kolonial membuka HCS (*Hollandsch Chineesche School*) dan kemudian sekolah-sekolah lanjutan antara lain MULO, HBS, HCK dan sebagainya untuk menandingi sekolah-sekolah dari golongan peranakan. Melalui THHK, mereka berharap orang Tionghoa dapat menjadi tionghoa kembali, karena beranggapan orang-orang tionghoa generasi penerus sudah melupakan adat-istiadat tionghoa, bahkan golongan totok sebagian telah bercampur adat-istiadat tionghoa dengan tradisi setempat.²

Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, persoalan identitas orang-orang Tionghoa menjadi suatu permasalahan yang serius. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diantara orang-orang Tionghoa peranakan berpendapat bahwa diperlukan suatu pendidikan sekolah untuk mengajarkan budaya, bahasa, dan adat istiadat Tionghoa. Berbagai upaya dilakukan untuk memajukan kebudayaan dan peradaban mereka serta men-Tionghoa-kan kembali orang-orang Tionghoa Peranakan utamanya dengan cara mengusahakan pendidikan bagi anak-anak Tionghoa.

Pada masa penjajahan Belanda kondisi masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda mengalami pergolakan. Orang-orang Tionghoa peranakan merasa bahwa mereka mendapat kedudukan yang rendah dan mengalami diskriminasi dari penguasa Belanda. Dalam hal pendidikan, pemerintah Hindia-Belanda tidak pernah mempedulikan pendidikan orang-orang Tionghoa karena status mereka masih diragukan. Sebelum abad ke-20, orang-orang pribumi bersekolah di pesantren, mereka diajari membaca Al-Quran. Sedangkan sekolah-sekolah Belanda hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda saja dan golongan Eropa yang lain.³

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam melestarikan kebudayaan Tionghoa. Pendidikan

merupakan faktor yang penting, strategis dan determinatif bagi masyarakat. Maju-mundurnya kualitas peradaban suatu masyarakat/bangsa sangat bergantung pada bagaimana kualitas pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang menyadari dan memahami makna strategisnya pendidikanlah yang mampu meraih kemajuan dan menguasai dunia. Bagaimana pun, pendidikan merupakan alat terefektif bagi perubahan dan pencapaian kemajuan dalam berbagai demensi kehidupan.⁴

Baru pada tahun 1901 didirikan sebuah sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Tionghoa, yaitu THHK (*Tionghoa Hwe Koan*) dengan tujuan supaya anak-anak Tionghoa mengenal tentang kebudayaan Tionghoa. Menghadapi tantangan yang seperti itu, pada tahun 1908 pemerintah Hindia-Belanda mendirikan HCS (*Hollands Chineesche Scholen*), yaitu sekolah-sekolah dasar gaya baru yang dikhususkan untuk anak-anak Tionghoa dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Hal ini merupakan bagian dari politik kolonial yang senantiasa melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Hindia Belanda.⁵

Pemerintah kolonial Belanda menjadikan HCS sebagai alat politik untuk menjadikan orang Tionghoa supaya menjadi loyal terhadap pemerintah Belanda serta sebagai usaha untuk menciptakan iklim pendidikan yang sesuai dengan kebijakan politik kolonial. Sebelumnya, hanya sedikit anak-anak Tionghoa yang memperoleh pendidikan Belanda, namun dengan adanya HCS jelas mereka memilih pendidikan yang berbahasa Belanda daripada sekolah-sekolah yang berbahasa Tionghoa karena prospek pekerjaan lulusan THHK sangat terbatas dan bahasa Tionghoa tidak dipakai dalam dinas pemerintahan.⁶

Perdebatan mengenai sekolah-sekolah untuk anak Tionghoa semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu. Banyak dari orang-orang Tionghoa peranakan memperlakukan mengenai pendidikan di THHK dan HCS untuk kepentingan anak-anaknya, karena bagi orang-orang Tionghoa itu adalah hal yang sangat penting dan penting untuk dibicarakan. Seiring dengan meningkatnya gelombang nasionalisme Tiongkok dan melihat realitas pendidikan yang terjadi pada orang-orang Tionghoa peranakan, maka banyak diantara orang-orang Tionghoa yang melakukan kritik terhadap pendidikan untuk anak-anak Tionghoa, salah satunya yaitu Kwee Kek Beng. Kwee Kek Beng banyak menulis kritik-kritikannya melalui media surat kabar.

Kwee Kek Beng merupakan satu diantara para jurnalis yang berpendirian kuat sehingga dijuluki kepala

¹ Charles A, Coppel. 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis, cetakan pertama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm: 39.

² Siauw Giok Tjhan. 1981. *Lima Jaman Perwujudan Integrasi Wajar*. Jakarta : Yayasan Teratai. Hlm: 19.

³ Ong Hok Ham. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa, cetakan pertama*. Jakarta: Komunitas Bambu. Hlm: 90

⁴ Haryanto. *Membangun Kesadaran Kritis Melalui Pendidikan*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/131656343/PENDIDIKAN%20MENGUBAH%20PERADABAN.pdf>, diakses pada 13 Mei 2014, pkl 13:41.

⁵ Leo Suryadinata. 1978. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia. Hlm: 21.

⁶ Charles A, Coppel. *Op.cit*. Hlm: 11

batu, dan tulisan-tulisan/kritikan-kritikannya yang terkenal sangat tajam sehingga sering menimbulkan reaksi di berbagai pihak. Kwee Kek Beng merupakan seorang tokoh Tionghoa peranakan yang menjadi redaktur *Sin Po* pada kurun waktu 1925 – 1947 dan sekaligus penerus dari ide nasionalisme Tiongkok serta menjadikan *Sin Po* sebagai *opinion marker* di kalangan masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda.⁷

Sebagai seorang peranakan yang dibesarkan dalam suasana nasionalisme Tionghoa dan berpendidikan Belanda, Kwee Kek Beng paham betul akan kondisi orang-orang Tionghoa yang ada di Hindia Belanda. Kwee Kek Beng menginginkan orang-orang Tionghoa yang telah kehilangan sifat-sifat ke-Tionghoan-nya harus di Tionghoa-kan kembali, salah satunya melalui sarana pendidikan. Pada kesempatannya dalam kongres Semarang tahun 1927, Kwee Kek Beng diundang untuk menuliskan prasaran yang salah satunya tentang pendidikan untuk anak-anak Tionghoa.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu (1) Mengapa Kwee Kek Beng melakukan kritik terhadap pendidikan untuk anak-anak Tionghoa di Hindia Belanda?; (2) Faktor-faktor apa saja yang mendorong Kwee Kek Beng untuk melakukan kritik terhadap pendidikan untuk anak-anak Tionghoa?; (3) Bagaimana kritik Kwee Kek Beng terhadap pendidikan untuk anak-anak Tionghoa di Hindia Belanda ?

Metode yang digunakan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap ini, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan penulisan data melalui internet, hal ini bertujuan untuk mencari data yang bersesuaian dengan judul penelitian. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan sumber-sumber baik primer maupun sekunder yang berupa majalah dan koran yang terkait dengan tulisan-tulisan Kwee Kek Beng yang mengkritik terhadap pendidikan anak-anak Tionghoa, serta buku-buku yang terkait dengan riwayat hidup Kwee Kek Beng, pendidikan anak-anak Tionghoa pada masa Kolonial, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Kolonial.

Sumber-sumber primer yang telah didapatkan antara lain: pre advis yang ditulis oleh Kwee Kek Beng dan diterbitkan pada dua koran besar di Batavia dan Semarang yaitu, *Sin Po* dan *Djawa Tengah* pada tahun 1927, *Sin Po* tahun 1923, 1926, 1927, 1928, Koran *Djawa Tengah* tahun 1927, 1928, 1929, majalah *Djawa Tengah Review* tahun 1928, 1929, 1930, majalah *de Chineesche Revue*, yaitu sebuah majalah yang dikepalai oleh Kwee Kek Beng dan terbit setiap tiga bulan sekali tahun 1927, 1928, 1929 dan buku karya Kwee Kek Beng sendiri yang berjudul “*Doa Poeloe Lima Taoen sebagai Wartawan*”, terbit pada tahun 1948, dalam buku ini peneliti mendapatkan gambaran mengenai sosok Kwee Kek

Beng.. Selain sumber primer, peneliti juga mendapatkan sumber-sumber sekunder. Sumber sekunder yang telah didapatkan antara lain berupa buku karya Leo Suryadinata yang berjudul *Mencari Identitas Nasional: dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien, politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, dan majalah *Prisma* tahun 1984.

Tahap Heuristik tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui perpustakaan. Perpustakaan yang dijadikan sumber pustaka antara lain : a) Perpustakaan jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, b) Perpustakaan pusat Universitas Negeri Surabaya, c) Perpustakaan Medayu Agung, d) Perpustakaan Daerah Jawa Timur, dan e) Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas).

Setelah mendapatkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, tahap selanjutnya adalah kritik. Kritik dilakukan untuk menguji sumber-sumber yang telah dikumpulkan dengan membandingkan sumber-sumber lain yang relevan, dari proses kritik ini akan diperoleh data yang akurat sehingga penulisan ini memiliki kredibilitas. Dalam tahap ini, proses kritik terjadi ketika peneliti menemukan dua hal yang berbeda. Pada beberapa sumber ada perbedaan penyebutan tahun berdirinya THHK yaitu tahun 1900 dan tahun 1901. THHK memang berdiri pada tahun 1900, akan tetapi masih berbentuk sebuah organisasi untuk orang-orang Tiongho. Baru pada tahun 1901, THHK berkembang menjadi sebuah organisasi dalam bidang pendidikan,

Setelah melakukan kritik dan mendapatkan fakta, tahap selanjutnya adalah interpretasi. Tahap ini merupakan usaha untuk memahami fakta sejarah, memilah dan menetapkannya sebagai sumber, serta menyusun fakta tersebut berdasarkan kronologi peristiwa yang saling berkaitan. Tahap terakhir dari penelitian ini adalah historiografi yang merupakan kegiatan merekonstruksi peristiwa sejarah ke dalam bentuk tertulis. Pada tahap ini fakta yang sudah disintesis kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah sehingga dapat dipahami oleh pembaca dengan baik.

B. Pembahasan

A. Kondisi Sosial Masyarakat Tionghoa

Lama sebelum kedatangan orang-orang kulit putih, orang-orang Tionghoa telah hidup rukun bercampur baur dengan penduduk setempat (pribumi), namun kedatangan orang kulit putih terutama Belanda yang mempunyai niat untuk menguasai kepulauan Nusantara merusak hubungan baik etnis Tionghoa dengan penduduk setempat, terutama dengan etnis Jawa. Pemerintah kolonial Belanda menggunakan prinsip *divide et impera*⁹ untuk menguasai wilayah jajahannya.

⁷ Prisma, no. 10 tahun 1984. “*Kwee Kek Beng: Dilema Peranakan Berhaluan Nasionalisme Tionghoa*”. Hlm: 83.

⁸ Leo Suryadinata. 1986. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917 – 1942, cetakan pertama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm: 126.

⁹ *Divide et Impera* atau yang disebut dengan politik pecah belah/adu domba adalah kombinasi strategi politik, militer dan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah

Pemerintah kolonial melakukan politik *separatisme* antar golongan penduduk dan mencoba untuk mengisolasi antar golongan. Tahun 1854 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Regering Reglement* yang didalamnya mengatur pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang Eropa (*Europeaan*), yaitu golongan orang-orang kulit putih yang terdiri dari masyarakat kebangsaan Eropa termasuk didalamnya orang Belanda, Inggris, Amerika termasuk Jepang merupakan golongan utama. Masyarakat dalam golongan ini adalah orang-orang Indo yang merupakan hasil perkawinan campuran antara orang kulit putih dengan orang Timur atau bumiputera.¹⁰ Golongan kedua adalah golongan orang-orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*). Golongan ini terdiri dari orang-orang Arab, Siam, India, Sikh, dan orang-orang Tionghoa. Golongan yang terakhir adalah orang-orang pribumi (*Inlander*). Peraturan hukum bagi orang-orang bumiputera dibuat tersendiri yang ketentuan dan akibat hukumnya berbeda dengan peraturan bagi masyarakat kulit putih. Dampak dari penggolongan kelas masyarakat tersebut menimbulkan *eksklusivisme*, karena masing-masing golongan masyarakat diposisikan dalam stratifikasi sosialnya dan tidak boleh membaur dengan golongan yang lain.

Perlakuan diskriminatif juga dirasakan orang-orang Tionghoa dalam bidang hukum dan peradilan. Misalnya dalam perkara kriminal, tertuduh Tionghoa harus diadili di *Landraad*, yaitu pengadilan bagi warga pribumi karena dalam aturan hukum pidana, status orang-orang Tionghoa disamakan dengan kaum pribumi (*Gelijkgesteld met de Inlanders*).¹¹ Dalam perkara sipil/perdata yang berkaitan dengan soal perdagangan, hutang-piutang, dan harta warisan, peradilan orang Tionghoa ditangani *Raad van Justitie*, yaitu peradilan untuk orang Eropa. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1848, secara *yurisdiksi* orang-orang Tionghoa dimasukkan dalam hukum dagang Hindia Belanda (*Wetboek van Koophandel*).

Pada akhir abad ke-19, Pemerintah Kolonial mengeluarkan peraturan-peraturan lain yang ditujukan untuk orang-orang Tionghoa, hal tersebut bertujuan untuk membatasi orang-orang Tionghoa. Melalui *wijkenstelsel*, orang-orang Tionghoa dan orang-orang Timur Asing lainnya dibatasi dalam mobilitas fisiknya dengan keharusan tinggal di perkampungan sendiri, sehingga hal ini memunculkan pola pemukiman etnis (*ghetoo*) yang kemudian dikenal sebagai “kampung pecinan”. Peraturan berikutnya adalah *passenstelsel*, dalam peraturan tersebut Pemerintah Kolonial mengharuskan orang-orang

kelompok-kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga lebih mudah untuk dikuasai. Strategi ini diperkenalkan oleh seorang orientalis Belanda, yaitu *Christian Snouck Hurgronje* pada saat menjajah Indonesia.

¹⁰ Robert Van Niel. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya. Hlm: 26.

¹¹ Leo Suryadinata. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917 – 1942, cetakan pertama*. Op.Cit. Hlm: 22.

Tionghoa untuk membawa kartu *pass* (surat izin) jalan apabila mereka ingin melakukan perjalanan keluar daerah, hal ini tentu saja sangat membatasi kebebasan mereka. Tujuan dari diterapkannya *Wijkenstelsel* dan *passenstelsel* oleh pemerintah Kolonial adalah supaya orang-orang Tionghoa dan orang-orang pribumi tidak dapat bersatu, sehingga tidak dapat menentang kekuasaan pemerintah Kolonial di Hindia Belanda.

B. Pendidikan Anak-anak Tionghoa pada Masa Kolonial

Pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk di Hindia Belanda menjadi tiga golongan. Setiap golongan mempunyai cara hidup dan *instituu*t (pengajaran) yang berbeda. Pengajaran/pendidikan sangat mempengaruhi cara hidup suatu golongan. Sejarah pendidikan untuk orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda berjalan seiring dengan perkembangan rasa persatuan di kalangan orang-orang Tionghoa.

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Regerings Reglement* (Peraturan Pemerintah) pada tahun 1818 yang menunjukkan pandangan baru dalam pendidikan kolonial. Sekolah-sekolah yang dahulunya sebagai institusi khusus (berhubungan dengan agama), mulai mendapat perhatian pemerintah kolonial dan menawarkan anak-anak pribumi untuk bersekolah di sekolah-sekolah Belanda.¹²

Pendirian fasilitas pendidikan oleh pemerintah Belanda bagi penduduk pribumi ternyata tidak terjadi pada masyarakat Tionghoa. Pendidikan untuk masyarakat Tionghoa selalu diabaikan, bahkan sampai pada tahun 1896 pemerintah menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak mempunyai kewajiban untuk memberi anak-anak Tionghoa pendidikan. Anak-anak Tionghoa dapat diterima masuk sekolah berbahasa Belanda atau bahasa daerah apabila masih ada tempat kosong.¹³

Pada tahun 1845 pemerintah kembali membuka sedikit kesempatan bagi anak-anak Tionghoa untuk belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan syarat tertentu. Terutama, mereka harus memiliki izin dari Komisi Pengajaran. Peraturan baru pun terus digulirkan. Kemudian pada tahun 1849, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Algemeen Verslag van het Onderwijs* (laporan umum pengajaran), dalam laporan tersebut disebutkan adanya hak *privilege* bagi anak-anak Tionghoa untuk bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Pada kenyataannya, anak-anak Tionghoa tersebut sama sekali tidak diperkenankan belajar di sekolah-sekolah Eropa. Komisi Pengajaran yang disetujui oleh pemerintah pada 1849 menyatakan bahwa anak-anak Tionghoa (termasuk anak-anak Jawa) bisa “merusak” perkembangan moral anak-anak Eropa.¹⁴

¹² Ming Govars. 2005. *Dutch Colonial Education: The Chinese Experience in Indonesia 1900-1942*. Chinese Heritage Centre : Singapore. Hlm: 39.

¹³ Leo Suryadinata. 1988. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Op.Cit. Hlm: 6.

¹⁴ Ming Govars. *Op. cit.* Hlm: 69.

Diterapkannya politik balas budi oleh pemerintah Kolonial Belanda terhadap daerah jajahan di Hindia Belanda pada tahun 1901 atau yang sering disebut dengan istilah *politik etis* merupakan zaman baru dalam politik kolonial, yaitu zaman etis.

Persoalan pendidikan yang pada mulanya bagi kebanyakan orang Tionghoa kurang menjadi prioritas perhatian, sejalan dengan waktu mulai mendapat perhatian dari kalangan mereka sendiri. Orang-orang Tionghoa sadar bahwa kemajuan suatu negeri sangat bergantung pada rakyatnya, apabila rakyatnya bodoh maka negeri tersebut akan musnah/hancur. Berdasarkan alasan tersebut, orang-orang Tionghoa bersemangat untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah dan mulai mendirikan sekolah untuk anak-anak Tionghoa.¹⁵

Sekolah Tionghoa modern baru muncul pada tahun 1901. Sekolah-sekolah ini merupakan sekolah modern yang didirikan oleh perkumpulan orang-orang Tionghoa peranakan yang bernama *Tiong Hoa Hwe Koan* (THHK). Perkumpulan ini berdiri pada tahun 1900. Perkumpulan ini pada awal berdirinya bercita-cita mendirikan sekolah modern bagi orang Tionghoa dan memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak Tionghoa. Cita-cita itu kemudian dapat diwujudkan setelah satu tahun perkumpulan ini berdiri. Perkumpulan THHK dan sekolahnya sangat dipengaruhi oleh nasionalisme Tiongkok¹⁶, oleh karena itu tujuan dari berdirinya sekolah ini adalah agar orang-orang Tionghoa Peranakan kembali memperlihatkan adat istiadat, sejarah kebudayaan dan pandangan hidup Tiongkok.

Dibukanya sekolah THHK ini mendapat dukungan dari pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok kemudian mulai mengirim guru-guru Tionghoa ke Hindia Belanda. Tujuan berdirinya THHK adalah memperkenalkan pembaruan kebudayaan dan kemasyarakatan di kalangan orang Tionghoa peranakan yang didasarkan pada ajaran-ajaran Tionghoa. Tujuan dasar dari sekolah THHK ini dengan jelas dituliskan dalam buku "riwayat 40 tahun THHK Batavia sebagai berikut:

"bikin maju istiadat bangsa Cina, seboleholeh dengan menurut aturannya Nabi Khong Hu Cu serta tidak bersalahan dengan adat sopan, dan lagi akan bikin maju antara bangsa Cina pengetahuan atas hal surat-surat dan bahasa-bahasa."¹⁷

Awalnya sekolah THHK yang ada di Batavia sangat menarik perhatian dan minat orang-orang Tionghoa baik Tionghoa Peranakan maupun Totok. Tiga tahun setelah pendirian sekolah THHK di Batavia, barulah dibuka sekolah THHK baru diseluruh Jawa. Bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran adalah bahasa *Tjeng Im* (Tionghoa), sesuai dengan ide persatuan masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda.

¹⁵ Sin Po, 25 November 1927 "Sekolahan Tionghoa".

¹⁶ Ong Hok Ham. *Op Cit.* Hlm: 96 – 97.

¹⁷ Nio Joe Lan. 1940. *Riwayat 40 Tahun THHK Batavia.* Batavia: Ting Hoa Hwe Koan. Hlm: 202.

Penghapusan sistem konsesi (Politik Etis), munculnya *Chineesche Beweging* (Gerakan orang Tionghoa) dan berkembangnya pendidikan *Tiong Hoa Hwe Koan* yang nasionalis pada awal abad ke-20, menjadikan kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda terhadap golongan Tionghoa berubah drastis. Kebangkitan nasionalisme Tionghoa terwujud dengan munculnya *Tionghoa Hwe Koan* (THHK) yang mendorong nasionalisme pendidikan dan budaya; *Sianghwee* (Kamar Dagang Tionghoa) yang mendorong nasionalisme di bidang perdagangan; dan surat kabar peranakan, *Sin Po* yang mempromosikan nasionalisme politik. Kondisi yang seperti itu menjadikan pemerintah Hindia Belanda khawatir.

Anak-anak Tionghoa mulai diberi pendidikan Belanda pada tahun 1908 dengan membuka *Hollandsch Chineesche School* (HCS) di Batavia. Pembukaan sekolah ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda terhadap pertumbuhan sekolah THHK dan ide persatuan di kalangan masyarakat Tionghoa. Pemerintah Hindia Belanda khawatir terhadap guru-guru yang mengajar di THHK melakukan propaganda nasionalisme Tiongkok pada murid-murid THHK, yang nantinya akan berakibat munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Kurikulum HCS disamakan dengan sekolah-sekolah Belanda lainnya yang tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan yang murni kepada anak-anak Tionghoa. Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Belanda, meskipun HCS diperuntukkan untuk anak-anak Tionghoa namun bahasa dan kebudayaan Tionghoa tidak diajarkan. Hal inilah yang menyebabkan orang tua *Totok* enggan mengirimkan anaknya ke sekolah tersebut. Sebaliknya, para orang tua Tionghoa peranakan menganggap HCS adalah sebagai tempat yang tepat untuk anak-anak mereka hal ini mudah dipahami karena mereka tidak memahami bahasa Tionghoa dan oleh karena itu mereka tidak tertarik pada sekolah-sekolah Tionghoa nasional. Sekolah-sekolah HCS tersebut menarik banyak anak-anak Tionghoa peranakan yang jumlahnya semakin lama semakin besar.

Pendirian HCS menunjukkan dengan jelas bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat politik yang digunakan untuk menjauhkan orang-orang Tionghoa terhadap kebangsaannya. Segala sesuatu yang bersifat keTionghoan tidak diajarkan, terutama bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa dianggap tabu oleh Pemerintah Hindia Belanda, sehingga dilarang untuk diajarkan. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa HCS bukanlah sekolah yang mengajarkan tentang *pedagogik* melainkan sebuah alat politik yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda.¹⁸

HCS juga membuka kesempatan kepada lulusannya untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) ataupun HBS (*Hoogere Burger School*). Lain halnya dengan lulusan sekolah yang berbahasa pengantar Tionghoa, lulusan dari sekolah ini harus pergi ke luar negeri untuk melanjutkan

¹⁸ Sin Po, 2 November 1926 "Hollan. Chin. School sebagai Gegaman Politik".

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Didirikannya HCS menimbulkan rasa tidak puas di kalangan Bumiputera, yang menuntut sekolah yang sama derajatnya. Didirikannya HCS juga menjadi pemicu dalam mempercepat pembukaan HIS (*Hollandsch Inland School*) yang membuka jalan kepada rakyat Indonesia agar dapat melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.¹⁹

Meningkatnya minat peranakan Tionghoa terhadap pendidikan di HCS, mengakibatkan menurunnya minat peranakan Tionghoa untuk memasukan anak-anak mereka ke sekolah THHK. Turunnya minat tersebut tidak hanya disebabkan oleh tidak diajarkannya bahasa Belanda di sekolah THHK, namun juga disebabkan tidak ada usaha dari pihak pengurus THHK untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah tersebut. Banyak guru-guru yang mengajar di sekolah THHK tidak pernah mendapatkan pendidikan guru, sehingga cara mereka mengajar kurang baik, bahkan beberapa diantara mereka sering melukai murid-muridnya ketika murid tidak bisa memahami yang diajarkan oleh guru.

C. Riwayat Hidup Kwee Kek Beng

Kwee Kek Beng lahir pada tanggal 6 November 1900 di Batavia, Kwee Kek Beng tidak pernah mendapatkan pendidikan formal di sekolah Tionghoa, namun pendidikan yang ditempuh oleh Kwee Kek Beng adalah pendidikan Barat. Pendidikan pertama yang ditempuh oleh Kwee Kek Beng adalah HCS. Setelah lulus dari HCS, Kwee Kek Beng melanjutkan pendidikannya di MULO (Sekolah Menengah Belanda) yang ada di Betawi.²⁰ Setelah lulus dari MULO Kwee Kek Beng melanjutkan pendidikannya di HCK (*Hollandsch-Chineesche Kweekschool*)²¹ di Matraman *Meester Cornelis* yang kemudian dipindahkan di *Lionelaan*.

Lulus dari HCK, Kwee Kek Beng menjadi guru HCS di Tanjakan Empang (Bogor). Kwee Kek Beng menjadi guru hanya dalam waktu empat bulan saja, yaitu dari bulan Juli – Oktober 1922. Di samping menjadi guru, Kwee Kek Beng juga membantu menulis artikel di koran *Java Bode* yaitu sebuah koran Belanda yang membuka "*Psychologhisce Rubriek*" sebagai rubrik baru. Artikel pertama yang ditulis dalam koran tersebut adalah *De Psychologie der Geesting Heid*, selanjutnya adalah *De Psychologie van Het Debat*, *De Psychologie van Het Droomen*, *De Psychologie van Het Huis Houden*, dan lain-lain.²²

¹⁹ Peter Cary. 1985. *Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755 – 1825*. Jakarta: Pustaka Asset. Hlm: 33.

²⁰ Kwee Kek Beng. 1948. *Doea Poeloeh Lima Taoen Djadi Wartawan*. Batavia-Kuo. Hlm: 9.

²¹ HCK (*Holland Chinese Kweekschool*) adalah sekolah guru Belanda yang diperuntukkan untuk orang-orang Tionghoa. Belum diketahui secara pasti kapan Kwee Kek Beng masuk ke dalam sekolah HCS, MULO, dan HCK.

²² Kwee Kek Ben. *Op.Cit.* Hlm: 10.

Pada saat Kwee Kek Beng kembali ke Batavia, Kwee Kek Beng bertemu dengan Na Tjin Hoe. Na Tjin Hoe adalah teman kecil Kwee Kek Beng yang pada saat itu menjabat sebagai redaktur *Sin Po* dan meminta Kwee Kek Beng untuk mengirimkan tulisan-tulisannya di *Sin Po*. Setelah pertemuannya dengan Na Tjin Hoe, Kwee Kek Beng mendapat tawaran dari Thung Liang Lee untuk menjadi seorang jurnalis di *Sin Po*. Tawaran-tawaran tersebut pada awalnya ditolak oleh Kwee Kek Beng, namun ketika Hauw Tek Kong dan Kwee Tek Hoay memberikan tawaran lagi, Kwee Kek Beng tidak dapat menolaknya lantaran Hauw Tek Kong dan Kwee Tek Hoay benar-benar memaksanya.

Pada tahun 1922 akhir, Kwee Kek Beng memulai karirnya sebagai seorang wartawan. Awalnya Kwee Kek Beng menjadi pemimpin dari surat kabar *Bin Seng*, yaitu sebuah harian kecil yang dibiayai oleh *Sin Po*, namun *Bin Seng* kurang menarik dan tidak berusia lama sehingga harus dibubarkan. Tidak terbitnya *Bin Seng* menyebabkan Kwee Kek Beng bekerja dalam surat kabar *Sin Po* dan pada tanggal 1 Desember 1922, Kwee Kek Beng diangkat menjadi dewan redaksi harian *Sin Po*.²³

Pada tahun 1925, Tjoe Bou San yang pada waktu itu menjadi pemimpin redaksi sekaligus menjadi pemimpin direksi meninggal dunia akibat penyakit TBC yang dideritanya. Jabatan *Sin Po* kemudian dipecah menjadi dua, yaitu pemimpin direksi, yang dipimpin oleh Ang Jan Goan dan pemimpin redaksi, yang dipimpin oleh Kwee Kek Beng yang pada waktu itu berusia 25 tahun. Kwee Kek Beng menjabat sebagai pemimpin redaksi dari tahun 1925 – 1947. Di bawah kepemimpinan Kwee Kek Beng, *Sin Po* menjadi berkembang dan dijadikan sebagai *opinion marker* di kalangan masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda.

Dua tahun setelah Kwee Kek Beng menjabat sebagai pemimpin redaksi *Sin Po*, yaitu tahun 1927 Kwee Kek Beng diangkat menjadi pemimpin redaksi dari sebuah majalah "*De Chineesche Revue*" yang ditulis dalam bahasa Belanda dan terbit dalam tiga bulan sekali, namun usia "*De Chineesche Revue*" hanya bertahan dalam waktu tiga tahun saja, yaitu dari tahun 1927 – 1929 dan konsentrasi Kwee Kek Beng tetap kepada *Sin Po*.²⁴

Kwee Kek Beng merupakan tokoh penerus dari ide nasionalisme Tiongkok dan merupakan satu diantara para jurnalis Tionghoa berpendidikan kuat sehingga dijuluki kepala batu, tulisan-tulisan/kritikan-kritikannya yang terkenal sangat tajam sehingga sering menimbulkan reaksi di berbagai pihak. Kritiknya terhadap pemerintah Hindia Belanda juga sangat tajam dan penuh sindiran. Kwee Kek Beng seringkali menggunakan nama samaran "Anak Jakarta", "Thio Boen Hiok", dan "Garem" dalam tulisan-tulisannya yang dimuat dalam surat kabar²⁵.

²³ *Ibid.* Hlm: 14.

²⁴ Oei Liong Thay. (Tanpa Tahun). *Selayang Pandang Journalist dan Pers Tionghoa di Jaman Ned. – Indie. Nederland*: (Tanpa Penerbit). Hlm: 10.

²⁵ Que Soei Keng. 2009. *Denken over de Peranakan Identiteit: Kwee Kek Beng (Guo Keming)*. <http://www.huayixieshanghui.nl/contribute/artikel-2009->

D. Faktor-faktor yang Mendorong Kwee Kek Beng Melakukan Kritik

1. Diskriminasi dan Segregasi dalam Pendidikan

Selama abad ke-19, politik pemerintah Belanda adalah mengisolasi golongan yang satu dengan yang lain. Hasilnya, terlihat pada abad ke-20 yaitu perbedaan diantara golongan terasa lebih tajam dibandingkan pada abad sebelumnya. Kebijakan segregasi atas sekolah untuk sebagian orang merupakan pernyataan dari apa yang hidup dalam golongannya, termasuk untuk orang-orang Tionghoa. Menurut Dr. Van Duffelen, HCS didirikan karena anak-anak Tionghoa dianggap memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang Bumiputra. Maka, dengan alasan *pedagogis*, maka didirikanlah sebuah sekolah tersendiri untuk anak-anak Tionghoa.²⁶ HCS hanya terbuka bagi anak-anak Tionghoa yang mampu dalam bidang ekonomi, sehingga untukanak-anak yang perekonomiannya rendah tidak diperhatikan. Untuk dapat mengirinkan anak-anak Tionghoa ke HCS, maka orang tuanya harus berpenghasilan minimal $f\ 75 - f\ 100$ perbulan. Pada masa krisis, ketetapan tersebut berubah dan banyak anak-anak Tionghoa yang harus ditarik dari HCS.²⁷

2. Nasionalisme Tiongkok dan Lahirnya Kaum Intelektual Tionghoa

Penyebaran gagasan nasionalisme Tiongkok dan gerakan memurnikan kembali ke-Tionghoa-an dengan cepat mempengaruhi pemikiran sebagian orang-orang Tionghoa peranakan, sehingga melahirkan kaum-kaum intelektual Tionghoa. Kaum intelektual berusaha memepelajari dan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda seperti minimnya tingkat kesadaran nasionalisme Tiongkok. Pemecahan masalah yang dilakukan oleh kaum intelektual tersebut dituangkan melalui beberapa tulisan dalam surat kabar atau majalah. Hal tersebut juga dilakukan oleh Kwee Kek Beng. Usaha yang dilakukan oleh kaum intelektual tersebut merupakan salah satu bagian dari tindakan nasionalisme.

Semangat nasionalisme yang ada pada diri Kwee Kek Beng merupakan akibat dari kedudukan ideologi yang dominan dalam politik peranakan Tionghoa di Hindia Belanda selama dua dasawarsa pertama dari abad ke-20.²⁸ Kwee Kek Beng banyak belajar tentang kebudayaan-kebudayaan Tionghoa bukan dari buku-buku Tionghoa melainkan dari buku-buku yang ditulis dalam bahasa Barat, terutama bahasa Belanda yang dikuasainya.²⁹

3. Pemikiran Tjoe Bou San

[kwee-kek-beng_web.pdf](#), diakses pada tanggal 15 Januari 2014, pkl: 12:03.

²⁶ Ong Hok Ham. *Op. Cit.* Hlm: 101.

²⁷ *Ibid.* Hlm: 99.

²⁸ Leo Suryadinata. 1986. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa, cetakan pertama.* *Op.Cit.* Hlm: 125.

²⁹ Leo Suryadinata. *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien.* Jakarta: LP3ES. Hlm: 113.

Tjoe Bou San adalah *hoofdredactur* pertama dari *Sin Po* yang menjadikan *Sin Po* menjadi surat kabar terkenal dan mendapat sebutan "*aliran Sin Po*". Tjoe Bou San berpendapat bahwa pemerintah Hindia Belanda mendiskriminasi orang-orang Tionghoa, merendahkan orang-orang Tionghoa, dan tidak akan menjamin kepentingan orang-orang Tionghoa. Untuk menjamin kepentingan serta meningkatkan statusnya, orang-orang Tionghoa harus membantu negeri Tiongkok agar menjadi kuat sehingga bisa melindungi orang-orang Tionghoa perantauan.

Kwee Kek Beng banyak belajar dari Tjoe Bou San. Kwee Kek Beng yakin bahwa orang Tionghoa harus tetap berkiblat ke Tiongkok karena mereka adalah anggota bangsa Tiongkok yang besar. Orang-orang Tionghoa tidak boleh berasimilasi dengan *Hoan Nah* (penduduk asli) yang tidak beradab atau dengan Belanda, melainkan harus memelihara hubungan erat dengan Tiongkok yang dapat memberikan perlindungan kepada orang-orang Tionghoa, karena pada suatu saat orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda akan akan kembali ke Tiongkok. Kwee Kek Beng memiliki pendirian bahwa sekali Tionghoa tetap Tionghoa.³⁰

4. Melemahnya Identitas Orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda

Sebagian besar orang-orang Tionghoa telah terasimilasi dalam masyarakat setempat, sehingga orang-orang Tionghoa ini lebih menguasai bahasa dan budaya daerah atau bahasa Melayu-pasar yang pada masa kolonial digunakan sebagai bahasa perantara kaum pedagang di kota-kota.³¹ Ketika orang-orang Tionghoa peranakan ini bergaul dengan bangsa yang lain, orang Tionghoa ini juga dilematis untuk menentukan identitasnya sebagai orang Tionghoa, atau sebagai pribumi dan Belanda. Oleh sebab itu, demi mempertahankan identitas orang-orang Tionghoa sebagai golongan Tionghoa peranakan, maka usaha untuk mengembalikan kembali kebudayaan orang-orang Tionghoa diajarkan dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang pendidikan.

Kwee Kek Beng mengharapkan kepada orang-orang Tionghoa Peranakan yang telah kehilangan sifat-sifat ke-Tionghoan-nya harus diTionghoakan kembali, diantaranya melalui penggunaan bahasa Tionghoa di kalangan kaum peranakan. Bahasa Tionghoa harus digunakan oleh kaum peranakan di berbagai tingkatan, terutama dalam percakapan sehari-hari.³² Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan suatu identitas dari kaum Tionghoa Peranakan.

5. Perdebatan Mengenai Sekolah untuk Anak-anak Tionghoa

Banyak dari orang-orang Tionghoa Peranakan yang memindahkan anak-anaknya ke HCS dengan alasan

³⁰ Leo Suryadinata. *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien.* *Op.Cit.* Hlm: 31 – 32.

³¹ Leo Suryadinata. 1996. *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia.* Jakarta : PT. Gramedia. Hlm: 56.

³² Leo Suryadinata. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa, cetakan pertama.* *Op.Cit.* Hlm: 126 – 127.

bahwa kurikulum THHK tidak sesuai dengan kehidupan peranakan di Hindia Belanda dan lebih sesuai dengan kehidupan di Tiongkok. Selain itu, prospek pekerjaan lulusan THHK relatif tidak menarik orang-orang Tionghoa peranakan yang perekonomiannya meningkat dan telah berubah dengan menyukai dan mengharapkan pekerjaan kantor dan tenaga profesional.³³ Selain itu, lulusan sekolah THHK mengalami diskriminasi sosial dan digaji lebih rendah dibandingkan dengan lulusan dari sekolah Belanda.

6. Usaha Orang-orang Tionghoa untuk Memperbaiki Pendidikan

Permasalahan mengenai sekolah atau pendidikan untuk anak-anak Tionghoa memang sudah sering diperbincangkan, namun belum ada suatu keputusan yang memuaskan. Ada banyak yang mengajukan usul untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak Tionghoa yang tidak dapat diterima di HCS. Orang berpendapat bahwa HCS terlalu bersifat Belanda dan tidak cocok bagi anak-anak Tionghoa, sedangkan THHK memang mengutamakan bahasa Tionghoa, namun dalam pengajarannya kurang baik dan kurang praktis.

Kelompok yang setuju dengan HCS mengupayakan agar pelajaran yang bersifat keTionghoan, seperti Hikayat Tiongkok, ilmu bumi Tiongkok, bahasa Tionghoa (*Tjeng-im*), dan sebagainya untuk diajarkan. Kelompok yang pro HCS terdiri dari orang-orang Tionghoa peranakan yang berorientasi dan memperhatikan kepentingan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Kelompok tersebut menilai bahwa pelajaran dan kurikulum sekolah THHK sesuai untuk diajarkan di Tiongkok, namun tidak sesuai dengan kehidupan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Oleh sebab itu, kelompok tersebut mengumpamakan orang-orang Tionghoa yang membuka sekolah THHK seperti membuka *Gi Oh* (sekolah Tradisional).³⁴

Kelompok tersebut juga berpandangan bahwa ketidakmampuan pengurus THHK untuk membuka sekolah tingkat lanjut, serta tidak menghubungkan sekolah THHK dengan sekolah tingkat lanjut hingga sekolah tingkat tinggi di Hindia Belanda mengakibatkan sebagian besar lulusan THHK yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke Tiongkok terpaksa tidak bersekolah. Kondisi yang semacam itu mengakibatkan sebagian besar lulusan sekolah THHK tidak memiliki pekerjaan yang layak, sehingga sebagian besar para orang tua Tionghoa peranakan menyesal telah memasukkan anak-anaknya ke THHK dan memilih segera memindahkan anak-anaknya ke HCS.³⁵

Orang-orang yang setuju dengan THHK juga berupaya untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran yang bersifat keTionghoan agar lebih praktis dan mudah dimengerti. Masing-masing kelompok saling mengupayakan bagi sekolahnya, karena untuk

mendirikan satu sekolah untuk anak-anak Tionghoa dirasa tidak mungkin. Hal ini dikarenakan dari awal, sekolah-sekolah tersebut memang sudah terpisah ibaratnya air dan minyak.³⁶

Kelompok yang pro terhadap THHK, terdiri dari sebagian besar orang-orang Tionghoa Totok dan sebagian kecil orang-orang Tionghoa peranakan yang berhaluan nasionalis Tiongkok. Kelompok ini berpendapat bahwa pendidikan sekolah THHK tidak hanya penting untuk mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga berfungsi untuk menanamkan kesadaran tentang identitas ke-Tionghoan, kebangsaan, dan nasionalisme Tiongkok pada generasi muda Tionghoa.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh kelompok yang tidak puas dengan kurikulum pendidikan HCS maupun THHK. Menurut kelompok ini bahwa pendidikan HCS maupun THHK masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu tokoh Tionghoa peranakan lulusan sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda yang mengkritik sekolah THHK dan HCS adalah Kwee Kek Beng.

E. Kritik Kwee Kek Beng terhadap sekolah-sekolah untuk anak Tionghoa

Menurut Kwee Kek Beng, baik THHK maupun HCS keduanya memiliki nilai positif dan negatif. Sisi positif dari HCS adalah bahwa HCS merupakan suatu sekolah modern untuk anak-anak Tionghoa yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Bahasa Belanda menjadikan rasa percaya diri orang-orang Tionghoa bertambah ketika orang-orang Tionghoa bergaul dengan kelompok Belanda maupun pribumi. Selain itu, bahasa Belanda dapat mengantarkan anak-anak Tionghoa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan mudah.³⁷ Dalam hal memperoleh pekerjaan, lulusan dari sekolah berbahasa Belanda lebih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru, yaitu pekerjaan dalam bidang pemerintahan. Selama ini, sebagian besar orang-orang Tionghoa berprofesi sebagai pedagang.

Untuk nilai negatif dari HCS adalah, bahwa sekolah HCS terlalu bersifat Belanda dan dijadikan sebagai alat politik oleh pemerintah Hindia Belanda agar anak-anak Tionghoa perlahan-lahan meninggalkan kebudayaan Tionghoa dan identitas mereka sebagai orang Tionghoa. Bentuk propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda terhadap murid-murid HCS yaitu dengan tidak mengajarkan bahasa Tionghoa dalam HCS, sedangkan bahasa Belanda dan budaya Belanda lebih ditonjolkan. Tidak adanya libur pada saat hari kemerdekaan Tiongkok menjadikan anak-anak Tionghoa kurang memiliki rasa nasionalisme pada tanah leluhurnya. Kepala sekolah dari HCS telah membuat sebuah peraturan yang didalamnya mengatur tentang hari libur untuk murid-murid HCS. Peraturan tersebut melarang diliburkannya sekolah HCS pada saat hari kemerdekaan dari bangsa Tionghoa dan melarang segala hal yang berhubungan dengan Tiongkok. Hal ini sesuai dengan tulisan Kwee Kek Beng yang berbunyi:

³³ *Ibid.* Hlm: 11.

³⁴ Sinpo, 24 Mei 1922 "Kenapa Tiong Hoa Hak Tong Selaloe Kaloet".

³⁵ Shinta Devi ISR. *Etnis Tionghoa dalam Sejarah Pendidikan Masyarakat Kota Surabaya*. Yogyakarta: Penerbit Lilin. Hlm: 232.

³⁶ Sin Po, 2 Juni 1928 "Dari Doea Djoeroesan".

³⁷ Djawa Tengah Review, April 1929. Hlm: 5.

*Sikep jang tida manis pada bahasa Tionghoa, circulaire pada kapala-kapala dari Holl.Chin. Scholen boeat djangan sekali perhatiken kadjadian-kadjadian di Tiongkok dan sengadja tida perdoeliken hari rajah Nationaal dari bangsa Tionghoa (di itoe hari, sekola-sekola H.C.S. sengadja diboeka teroes) djoega dianggep sebagai tanda-tanda jang mengondjoek ka satu djoeroesan.*³⁸

Pada sekolah THHK nilai positifnya adalah Budaya Tionghoa, filsafat, dan agama Tionghoa (Khonghucu) diajarkan agar dapat memupuk rasa kebangsaan dan kebanggaan akan Tiongkok. Identitas ke-Tionghoan dan standar ideal yang mengikat orang-orang Tionghoa dengan Tiongkok tidak hanya ditandai dengan menghidupkan kembali adat istiadat Tionghoa berdasar ajaran Konghucu, namun kemampuan berbahasa Tionghoa menjadi hal yang pokok. Oleh sebab itu, dalam sekolah THHK juga diajarkan bahasa Tionghoa. Karena kemampuan berbahasa Tionghoa merupakan suatu simbol identitas Nasional Tiongkok yang dapat mempersatukan orang-orang Tionghoa. Sedangkan untuk nilai negatifnya adalah pengajaran di sekolah THHK tidak bersifat praktis. Selain itu, tidak ada pendidikan lanjut atau pendidikan yang lebih tinggi untuk lulusan sekolah berbahasa Tionghoa, termasuk THHK. Sehingga lulusan dari sekolah-sekolah tersebut yang ingin melanjutkan pendidikannya harus pergi ke Tiongkok, namun lulusan-lulusan tersebut harus cukup paham dengan bahasa Inggris untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas baik di Hongkong maupun di negeri Barat.³⁹ Konten pembelajarannya seputar budaya Tionghoa Bahasa yang diajarkan hanya bahasa Tionghoa, sehingga penguasaan bahasa dari murid-murid sekolah THHK sangat terbatas dan hal ini menjadikan murid-murid dari sekolah ini sulit berinteraksi dengan etnis lain. Selain itu, kebanyakan lulusan dari THHK sulit mendapatkan pekerjaan baru, sehingga kebanyakan lulusan dari sekolah THHK pada akhirnya akan menjadi seorang pedagang.

Permasalahan orang-orang Tionghoa yang ada di Hindia Belanda belum juga menemui jalan keluar, sehingga pada tahun 1927 diadakan sebuah pertemuan besar (konferensi) di Semarang. Konferensi ini banyak dihadiri oleh cendekiawan dari kaum Peranakan, termasuk Kwee Kek Beng. Hal-hal yang dibicarakan pada pertemuan tersebut berpusat pada masalah-masalah yang berkenaan dengan kaum Tionghoa Peranakan di Hindia Belanda, yaitu keikutsertaan orang Tionghoa dalam dewan-dewan perwakilan (*Volksraad*), kedudukan ekonomi orang-orang Tionghoa, dan yang terakhir mengenai pendidikan anak-anak Tionghoa.

Pendidikan untuk anak-anak Tionghoa pada abad ke-20 menjadi sebuah perbincangan yang serius dan menjadi perhatian khusus. Kwee Kek Beng dan beberapa tokoh peranakan diundang untuk menulis prasaran untuk

dijadikan dasar pembahasan kongres. Kwee ditugaskan untuk menulis dua buah prasaran, pertama prasaran yang berkenaan dengan perlunya orang Tionghoa di Hindia Belanda mengambil bagian dalam dewan-dewan perwakilan (*Volksraad*) dan yang kedua adalah mengenai pendidikan Tionghoa.⁴⁰ Pandangannya mengenai dewan perwakilan (*Volksraad*) juga dituliskan dalam prasarannya, sebagai berikut:

Selaen dari itoe orang bisa belaken kepentingan sendiri dengan begitoe dan zonder mempoenjai toekang angkat bitjara dalem madjelis-madjelis perwakilan, bisa kadjadian, jang orang bitjaraken tentang tapi zonder kita orang dan kaloe arken atoeran-atoeran, jang tida terlaloe mengontoengin kita.

*Partij jang tida satoedjoe madjoeken alesan bahoea Volksraad tjoema namanja sadja parlement, tjoema ada samatjem dot kosong, satoe tempat mengomong dimana orang tjoba pimpin pergerakan rahajat sependjang kanaal-kanaal jang tentoe sadja tida meroegiken pada politieke ingenieurs (jang gali itoe) satoe madjelis perwakilan jang semingkin banjak terbitken perasahan tjoeriga dari fihak Boemipoetra dan meskipoen ia orang akoe jang kapaentingan-kapentingan locaal jang ketjil bisa dibelaken dalem Volksraad atawa laen-laen madjelis perwakilan, boeat pendoedoek Tionghoa sebagai sagolongan toeroet bertjokol sedikit.*⁴¹

Keikutsertaan orang-orang Tionghoa dalam dewan perwakilan rakyat (*Volksraad*) menurut Kwee Kek Beng tidak ada manfaatnya bagi orang Tionghoa. Hal tersebut dikarenakan dewan-dewan perwakilan (*Volksraad*) merupakan bentukan dari pemerintah Hindia Belanda dan dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga pada akhirnya akan menguntungkan pihak kolonial sendiri.

Dewan-dewan perwakilan untuk orang-orang Tionghoa juga tidak pernah memperhatikan masalah-masalah pendidikan orang Tionghoa, orang-orang Tionghoa yang duduk dalam kursi *Volksraad* hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Sebagai golongan pendatang, orang-orang Tionghoa ini menginginkan suatu pendidikan yang praktis, namun tetap memegang teguh terhadap kesopanan Tionghoa dan dapat menjadikan orang-orang Tionghoa semakin dekat dengan tanah leluhurnya sehingga akan timbul suatu rasa bangga pada negerinya. Berdasarkan hal tersebut, harus ada suatu solusi untuk memecahkan persoalan mengenai pendidikan anak-anak Tionghoa.⁴²

Pendidikan itu harus sejalan dengan kepentingan masyarakat Tionghoa dan keperluan praktis dari Hindia. Sekalipun Kwee Kek Beng sendiri tidak pernah

⁴⁰ Prisma, no. 10 tahun 1984. "Kwee Kek Beng: Dilema Peranakan Berhaluan Nasionalisme Tionghoa". Hlm: 85.

⁴¹ Sinpo, 19 Maret 1927. Hlm: 1736.

⁴² Sin Po, 19 Maret 1927. Hlm: 1751.

³⁸ Sin Po, 19 Maret 1927. Hlm: 1735.

³⁹ Leo Suryadinata. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia. Op Cit.* Hlm: 21.

menguraikan konsepsinya mengenai Hindia Belanda dan orang-orang Tionghoa Hindia Belanda, namun dari beberapa artikel dan buku yang ditulisnya masih dapat diperoleh gambaran yang cukup baik dan menarik mengenai pandangannya.⁴³

Poetosan dari ini soeal dari itoe haroes ditjari ka djoeroesan satoe compromis antara hal-hal jang practisch boeat Hindia dan kapentingan-kapentingan jang bersifat ideel dan cultureel. Sampe sekarang ada doea matjem sekola boeat anak-anak Tionghoa; Holl. Chin. Scholen atas dasar jang terlaloe bersifat Blanda dan T.H.H.K. atas dasar nationaal Tionghoa, jang doea-doea tida memoeaskan lantaran doea-doea matjem kira-kira terletak sama djaoenja dari apa jang diinginken, jalah satoe sekola dimana dikasi peladjaran practisch jang bisa terpake, tapi berbareng dengan itoe perhatiken tjoekeop angen-angen kasopanan Tionghoa.

Orang bisa tjoba sampeken in idieel dengan ambil djalan dari H.C.S. atawa T.H.H.K. dengan laen perkatahan dengan robah H.C.S. jang sampe sekarang meloeloe bersifat Blanda djadi sekola jang lebih perhatiken cultuur Tionghoa dan dengan robah T.H.H.K. begitoe roepa, soepaja ia lebih perhatiken roepa-roepa kaperloean practisch boeat orang-orang Tionghoa disini. Kaloe dari kadoea fihak orang tjoba sampeken ini satoe ideaal, doea-doea matjem sekola pelahan-pelahan aken semingkin mirip satoe pada laen dan boleh djadi satoe tempo djadi satoe matjem sekola.⁴⁴

Pandangan Kwee Kek Beng tentang sekolah untuk anak-anak Tionghoa adalah bahwa suatu sekolah harus mengajarkan pelajaran-pelajaran yang bersifat praktis namun dapat digunakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak meninggalkan nilai kesopanan Tionghoa karena kesopanan Tionghoa sangatlah penting. Selain itu meningkatkan pengetahuan peserta didik, dan menjadikan anak didik berguna merupakan pokok dan tujuan dari pendidikan menurut Kwee Kek Beng adalah bahwa pendidikan itu sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan supaya peserta didik mampu mengembangkan wawasannya secara luas.⁴⁵ Oleh karena itu, Kwee Kek Beng ingin *mereorganiser* sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa, yaitu HCS dan THHK.

1. Perubahan terhadap Sekolah-sekolah HCS

HCS merupakan suatu sekolah yang hanya diperuntukkan untuk anak-anak Tionghoa, namun dengan kurikulum dan program-program seperti sekolah Belanda pada umumnya. Sekolah ini tidak akan cocok bagi anak-

anak Tionghoa jika dipandang dari segi *pedagogis*, karena dalam sekolah HCS menjadikan anak-anak Tionghoa hidup dalam dua lingkungan yang berbeda, artinya pertama dalam satu lingkungan sekolah yang jelas-jelas berbeda dengan keadaan di rumah, yang kedua dalam lingkungan Belanda yang hal ini sangat bertolak belakang dengan lingkungan Tionghoa.⁴⁶

Menurut Kwee Kek Beng selain tidak mengajarkan hal-hal yang bersifat kebangsaan dalam HCS anak-anak Tionghoa hanya diajarkan hal-hal yang bersifat kebarat-baratan seperti diajarkakan tentang pahlawan-pahlawan nasional Belanda, sedangkan pahlawan-pahlawan nasional Tionghoa tidak diperkenalkan sama sekali. Ilmu bumi Belanda juga diajarkan sangat detail sekali, sehingga murid-murid HCS ini lebih paham tentang Belanda daripada tanah leluhurya.⁴⁷

Pada dasarnya HCS memang tidak mau memperhatikan soal *pedagogis* dan *psikologi*. Didirikannya HCS ini hanya merupakan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda. Bahasa Tionghoa tidak dimasukkan dalam HCS, karena pemerintah Hindia Belanda menolak akan hal itu. Adanya dua bahasa dalam sekolah rendah oleh beberapa orang juga dianggap kurang baik, karena anak-anak terlalu dini untuk menerima dua bahasa yang berbeda. Selama ini, pemerintah Hindia Belanda selalu menganggap bahwa bahasa Tionghoa sama sekali tidak praktis dan tidak berguna di Hindia.

Jika menurut pemerintah Hindia Belanda bahasa Tionghoa tidak memiliki nilai praktis di Hindia Belanda, namun pemerintah Hindia Belanda tetap harus memperhatikan keinginan orang-orang Tionghoa untuk mengajarkan bahasa Tionghoa. Keinginan orang-orang Tionghoa supaya bahasa Tionghoa diajarkan dalam HCS merupakan suatu keinginan yang besar. Pelajaran Tionghoa dapat diajarkan kepada murid-murid pada sore hari, namun jauh lebih baik apabila bahasa Tionghoa dimasukkan dalam kurikulum di HCS bukan sebagai pelajaran tambahan, untuk pelajaran-pelajaran yang dirasa kurang penting seperti menyanyi, menggambar, dan olahraga sebaiknya jam pelajarannya dikurangi.⁴⁸

Dalam pandangan Kwee Kek Beng, seharusnya orang-orang Tionghoa mendirikan kursus-kursus bahasa Tionghoa untuk anak-anak Tionghoa yang ingin meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau jika tidak maka seharusnya pemerintah mendirikan *Chinese Mulo Schoolen*, dengan syarat bahasa Tionghoa akan menggantikan pelajaran bahasa Perancis, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Alasan Kwee Kek Beng menginginkan bahasa Tionghoa diajarkan kembali pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi adalah agar murid-murid tidak lupa dengan apa yang pernah dipelajarkan dalam pendidikan tingkat rendah.

Oerang soesa robah H.C.S. kaloe orang tida robah doeloe peladjaran dari goeroe Tionghoa dalem Holl. Chin. Kweekschool berhoboeng dengan itoe perobahan-

⁴³ Leo Suryadinata. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*. *Op.Cit.* Hlm: 126.

⁴⁴ Sin Po, 19 Maret 1927. Hlm: 1751.

⁴⁵ Djawa Tengah Review, Mei 1929. Hlm: 2.

⁴⁶ Djawa Tengah, 31 Maret 1927. Hlm: 1.

⁴⁷ Sinpo, 19 Maret 1927. Hlm: 1752.

⁴⁸ Djawa Tengah, 31 Maret 1927. Hlm: 1.

*perubahan;perubahan moesti moelain di Holl. Chin. Kweekschool.*⁴⁹

Untuk merubah HCS, maka perlu merubah pelajaran-pelajaran yang ada dalam HCK. Karena HCK akan menghasilkan guru-guru yang nantinya akan mengajar anak-anak Tionghoa. Seharusnya dalam HCK diajarkan tentang pengetahuan tentang *cultur* Tionghoa, dengan begitu maka akan melahirkan guru-guru yang berkualitas bagi anak-anak Tionghoa, yang paham akan budaya Tionghoa. Sehingga dalam mengajar dan mentrasfer ilmu kepada murid-murid, guru-guru lulusan HCK tidak akan mengalami kesulitan.

2. Perubahan terhadap Sekolah-sekolah THHK

Sesuai dengan kritik Kwee Kek Beng terhadap sekolah HCS dan THHK, bahwa keduanya perlu diadakan *reorganisasi*. Sekolah-sekolah THHK dapat diubah melalui tiga cara, hal ini diungkapkan dalam tulisannya:

Pertama, orang bisa goenaken T.H.H.K. boeat orang orang Tionghoa jang tida tetep tinggal di sini, djadi boeat marika jang ingin troesken peladjarannja di Tiongkok djoega ingin dapet pekerdjaan di sana, sedeng boeat orang orang Tionghoa jang tinggal tetep di sini bisa beladjar dalem H.C.S. jang soeda diroboh.

Kedoea, ada beberapa orang jang hendak robah T.H.H.K. begitoe roepa hingga bisa menjamboeng pada sekola-sekola Belanda, dengan oepama kasi peladjaran Blanda begitoe banjak di klas-klas tinggian, hingga merid-moerid jang tamat dari T.H.H.K. bisa teroesken peladjarannja oepama dalem sekola-sekola MULO.

*Ketiga, ada robah T.H.H.K. mendjadi sekola boeat semoea orang Tionghoa, dengan perhatiken kapentingannja anak-anak Tionghoa jang tinggal tetep disini dan jang aken poelang ka Tiongkok.*⁵⁰

Berdasarkan tulisan Kwee Kek Beng diatas, dapat diperoleh suatu gambaran mengenai perubahan sekolah-sekolah THHK : *Pertama* sekolah-sekolah THHK dijadikan sebagai sekolah untuk anak-anak Tionghoa yang tidak menetap di Hindia Belanda, dalam artian anak-anak Tionghoa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Tiongkok atau ingin mendapatkan pekerjaan di tanah leluhurnya sebaiknya dimasukkan dalam sekolah THHK, sedangkan untuk anak-anak Tionghoa yang ingin menetap di Hindia Belanda sebaiknya dimasukkan dalam sekolah HCS yang sudah diubah dalam segi kurikulum, pengajaran, dan pelajaran. *Kedua:* merubah THHK dengan cara memberikan pelajaran bahasa Belanda pada kelas yang tingkatannya

sudah tinggi, sehingga apabila murid-murid dari sekolah THHK ini lulus, maka murid-murid tersebut dapat melanjutkannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti MULO. Penambahan bahasa Belanda ini bukan berarti mengesampingkan bahasa Tionghoa, untuk anak-anak lulusan THHK dapat diberi pelajaran bahasa Belanda pada waktu sore hari, sehingga tidak akan mengganggu pelajaran bahasa Tionghoa dan tidak akan mempengaruhi kemampuan murid-murid lulusan THHK tersebut. *Ketiga:* menjadikan sekolah-sekolah THHK untuk semua anak-anak Tionghoa baik anak-anak yang ingin tetap tinggal di Hindia Belanda maupun anak-anak yang ingin pulang ke Tiongkok. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara yang ketiga adalah dengan membagi THHK ke dalam dua kelas, yaitu kelas yang dikhususkan untuk anak-anak Tionghoa yang ingin tetap tinggal di Hindia Belanda dan khusus yang akan pulang ke tanah leluhurnya. Meskipun dibagi menjadi dua kelas khusus, namun dalam pengajarannya harus tetap memperhatikan kepentingan anak-anak Tionghoa. Cara yang ketiga ini merupakan cara yang terbaik, namun bukanlah hal yang mudah karena tetap harus memperhatikan nilai praktis dan *pedagogis*.

Pemisahan terhadap anak-anak yang ingin tetap tinggal di Hindia Belanda dan yang ingin pulang ke Tiongkok ini, dilakukan pada saat anak-anak naik di kelas lima. Untuk anak-anak yang ingin pulang ke Tiongkok, maka pelajaran-pelajaran seputar Tiongkok dan ke-Tionghoa-an harus diajarkan secara mendalam. Sedangkan untuk anak-anak yang ingin tetap tinggal di Hindia Belanda, maka mereka mendapatkan pelajaran tambahan berupa pelajaran bahasa Belanda pada saat murid-murid ini naik di kelas 6, hal ini dilakukan agar anak-anak Tionghoa yang ingin tetap tinggal di Hindia Belanda dapat membaur dengan etnis yang lain, yaitu orang-orang pribumi dan orang-orang kulit putih (Eropa).

Apabila perubahan-perubahan terhadap kedua sekolah tersebut tidak memungkinkan, maka Kwee Kek Beng menginginkan sebuah sekolah yang memang dikhususkan untuk anak-anak Tionghoa dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Hindia Belanda.⁵¹

F. Reaksi dari Kritik Kwee Kek Beng

Banyak dari orang-orang Tionghoa yang menentang atau tidak sependapat dengan kritik Kwee Kek Beng, karena pada dasarnya banyak diantara orang-orang Tionghoa lebih mementingkan HCS dan tidak mepedulikan pendidikan yang mempersiapkan anak-anak Tionghoa peranakan untuk pulang ke Tiongkok. Selain itu, mereka menyerukan kepada pemerintah agar didirikan sekolah-sekolah semacam HCS untuk anak-

⁴⁹ Sinpo, 19 Maret 1927. Hlm: 1753.

⁵⁰ Sinpo, 19 Maret 1927. Hlm: 1753.

⁵¹ Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie. 10 Agustus 1935. *Een China-Instituut Bevordering van de Kennis der Chineesche Cultuur*.

anak Tionghoa.⁵² Pendapat ini diwakili oleh salah seorang peranakan yang bernama Dr. Yap Hong Tjoen⁵³.

C. Penutup

Pada awal abad ke-20 kaum peranakan Tionghoa di Jawa sebagian terasimilasi ke dalam masyarakat kolonial dan mengalami politik pecah belah Belanda. Ketidakadilan juga dirasakan oleh etnis Tionghoa karena berlakunya *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*, masyarakat Tionghoa hanya bisa berdiam di lokasi-lokasi yang telah ditentukan serta menghalangi kebebasan dan ruang gerak mereka. Politik Segregasi pemerintah kolonial Belanda ini menjadi salah satu penyebab utama timbulnya masalah Tionghoa dan juga perbedaan kedudukan hukum penduduk Hindia Belanda berdampak sangat buruk bagi hubungan antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi. Masalah politik segregasi tidak hanya berlaku dengan membatasi ruang gerak dan perbedaan hukum tetapi juga masalah pendidikan.

Kritik yang dilakukan oleh Kwee Kek Beng muncul ketika kondisi pendidikan untuk anak-anak Tionghoa dalam keadaan dibawah bayang-bayang kolonialisme yang berdampak pula pada kolonisasi terhadap pendidikan. Kolonisasi pendidikan tersebut membentuk pola pikir masyarakat untuk menjadi manusia yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki kemerdekaan. Artinya sekolah pada saat itu untuk mengantisipasi kurangnya tenaga kerja baik tenaga medis, administratur maupun tenaga yang lainnya untuk bekerja dibawah naungan gubernemen dengan jabatan dan upah yang rendah. Pada saat pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan pendidikan untuk anak-anak pribumi, kesempatan yang sama ini tidak diperoleh oleh anak-anak Tionghoa hingga pada akhirnya, pada tahun 1900 didirikanlah sebuah organisasi ke-Tiongho-an yang disebut *Tiong Hoa Hwee Koan* yang kemudian baru pada tahun 1901 organisasi tersebut mendirikan sebuah pendidikan. Didirikannya sekolah THHK membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir sehingga pada tahun 1908 pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak Tionghoa, yaitu HCS. Tujuan dari didirikannya sekolah HCS adalah untuk menyaingi perkembangan sekolah THHK.

Berkembangnya nasionalisme Tiongkok dan pendidikan Barat yang diperoleh oleh Kwee Kek Beng menjadikan Kwee Kek Beng sebagai seorang nasionalis Tiongkok yang menginginkan orang-orang Tionghoa peranakan yang telah kehilangan sifat ke-Tiongho-annya harus di-Tionghoakan kembali, salah satunya melalui sarana pendidikan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan masalah identitas orang-orang Tionghoa di Hindia

Belanda. Selanjutnya, perdebatan mengenai sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa menjadi pemicu Kwee Kek Beng untuk melakukan kritik. perdebatan-perdebatan mengenai sekolah-sekolah untuk anak Tionghoa tersebut melahirkan tiga kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan anak-anak Tionghoa. kelompok pertama menginginkan adanya perubahan terhadap THHK, kelompok kedua menginginkan adanya perubahan terhadap HCS, dan kelompok ketiga menginginkan adanya perubahan terhadap keduanya, baik THHK maupun HCS. Salah satu pendukung kelompok ini adalah Kwee Kek Beng.

Menurut Kwee Kek Beng baik THHK maupun HCS sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kwee Kek Beng merasa tidak puas dan tidak menyetujui sistem sekolah yang diterapkan pada sekolah THHK dan HCS. Kwee menganjurkan adanya sistem sekolah yang terpisah untuk anak-anak Tionghoa di Hindia Belanda, sehingga anak-anak Tionghoa tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa yang lain. Menurut pandangannya, HCS tidak mengajarkan tentang semangat kebangsaan Tiongkok. Sedangkan THHK tidak memiliki nilai praktis apabila dipandang dari sudut organisasi dan mata pelajarannya. Kwee Kek Beng mengusulkan agar HCS di Tionghoakan kembali dengan penambahan bahasa Tionghoa, sejarah Tiongkok, ilmu bumi, dan kebudayaan Tionghoa. Sedangkan untuk sekolah-sekolah THHK dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas untuk anak-anak yang ingin tetap tinggal di Hindia Belanda dan kelas yang diperuntukkan untuk anak-anak yang ingin pulang ke Tiongkok. Kwee Kek Beng juga mengharapkan adanya suatu pendidikan khusus untuk anak-anak Tionghoa dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di Hindia Belanda. Namun, kritik Kwee Kek Beng tersebut mendapatkan banyak tantangan dari orang-orang Tionghoa yang lain, salah satunya adalah Dr. Yap Hang Tjoen.

Daftar Pustaka

A. Koran dan Majalah

Sinpo, no.6 tahun 1923 – 1929.

Djawa Tengah tahun 1927 – 1929.

Djawa Tengah Review 1927 – 1930.

De Chinese Revue 1927 – 1929.

Prisma, no. 10 tahun 1984.

B. Buku

Beng, Kwee Kek. 1948. *Doea Poeloe Lima Taoen sebagai Wartawan*. Batavia – Kuo.

Coppel, Charles A. 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis, cetakan pertama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

⁵² Prisma, no.10 tahun 1984. "Kwee Kek Beng: Dilema Peranakan Berhaluan Nasionalis Tionghoa". Hlm: 85.

⁵³ Dr. Yap Hong Tjoen adalah seorang dokter medis lulusan dari Universitas Leiden dan pernah menjabat sebagai ketua CHH Nederland pada periode 1912 – 1914 (Leo Suryadinata. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917 – 1942*. Op.Cit. Hlm: 78)

- G.Tan, Melly. 1979. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Govars, Ming. 2005. *Dutch Colonial Education: The Chinese Experience in Indonesia 1900-1942*. Chinese Heritage Centre : Singapore.
- Ham, Ong Hok. 2005. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa, cetakan pertama*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- ISR, Shinta Devi. 2014. *Etnis Tionghoa dalam Sejarah Pendidikan Masyarakat Kota Surabaya*. Yogyakarta: Penerbit Lilin.
- Lan, Nio Joe. 1940. *Riwajat 40 Tahun THHK Batavia*. Batavia: Ting Hoa Hwe Koan.
- _____. 1953. *Tionghok Sepanjang Abad*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Setiono, Benny G.. 2002. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.
- Suryadinata, Leo. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa, cetakan pertama*. Jakarta: Garfiti Pers.
- _____. 1978. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia.
- _____. 1990. *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia, cetakan pertama*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- _____. 1986. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917 – 1942, cetakan pertama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 1971. *The Pre-World War II Peranakan Chinese Press of Java: a Preliminary Survey*. Ohio University Center for International Studies: Athens, Ohio.
- Thay, Oei Liong. (Tanpa Tahun). *Selayang Pandang Journalist dan Pers Tionghoa di Jaman Ned. – Indie. Nederland: (Tanpa Penerbit)*.
- Tjhan, Siau Giok. 1984. *Lima Jaman Perwujudan Integrasi Wajar*. Jakarta-Amsterdam: Teratai.
- Yau Hoon, Chang. 2012. *Identitas Tionghoa: Pasca Suharto (Budaya, Politik, dan Media)*. Jakarta: yayasan Nabil
- Yuanzhi, Kong. 2005. *Silang Budaya Tionghok – Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- (TanpaPengarang dan tahun terbit). *Orang-orang Tionghoa jang Terkemoeaka di Java*. Solo: The Biographical Publishing Centre.

C. Artikel / Internet

- Keng, Que Soei. 2009. *Denken over de Peranakan Identiteit: Kwee Kek Beng (Guo Keming)*. http://www.huayixieshanghui.nl/contribute/artikel-2009-kwee-kek-beng_web.pdf, diakses pada tanggal 15 Januari 2014, pkl: 12:03.
- Susetyo, Budi. *Krisis Identitas Etnis Cina di Indonesia*. http://f1.grp.yahooofs.com/v2/eEKnUv7fM8E9U19xY5C4WMvCRSMoIop5fJhgcsYFukPeWqgDr6csBe9TArsxnFYiPSKwZ_a3O314LDbWkFWCsagVjXm2iVL9JuwVfnSEh4SxVQAJfKbFr-2Fzkqg Jr2CHNd4wLnPY/Identitas%20sisial%20kelompok.pdf, diakses pada 10 Desember 2013, pkl 23:35.